



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR** 0107 / K. Bawaslu / PR.03.00/IV/2016

**TENTANG**

**STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu memberikan keseragaman standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

KESATU : Menetapkan Standar Kebutuhan Honorarium, Honorarium Kelompok Kerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Standar Kebutuhan Honorarium, Honorarium Kelompok Kerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Satuan Harga Honorarium, Honorarium Kelompok Kerja dan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri yang menangani bidang keuangan yang mengatur tentang standar biaya masukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2016

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**



**Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN  
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA

STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman dari Bawaslu RI.

Berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengamanatkan bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi dan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri mengamanatkan bahwa standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN dan dalam pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

Untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan, diperlukan pedoman tentang standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai acuan menyusun dan/atau menyempurnakan rencana kebutuhan/ rencana anggaran biaya Pemilihan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Keputusan ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyusun standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan disusunnya Keputusan ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menentukan standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Keputusan ini, meliputi:

1. Standar kebutuhan Honorarium dan Honorarium Kelompok Kerja serta barang dan jasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Standar kebutuhan Honorarium dan Honorarium Kelompok Kerja serta barang dan jasa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## **D. Pengertian Umum**

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,

gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;

10. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
11. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL;
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
18. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang- Undang;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
22. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah (Pemerintah Daerah) dengan penerima hibah (Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota);
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah;
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
27. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau

kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

28. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
29. Kelompok Kerja adalah tim yang dibentuk dan disusun secara resmi, berdasarkan surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/Pejabat Eselon I/KPA;
30. Instansi Pemerintah lainnya adalah instansi pusat, instansi vertikal, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan kegiatan tersebut saling berinteraksi dan bekerjasama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait pencapaian tujuan dan sasaran;
31. Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan adalah imbalan di luar gaji yang diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/ Pejabat Eselon I/KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa terkait dengan pencapaian output;
32. Besaran Honorarium merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
33. Hari adalah hari kalender.

Lampiran II

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN 2017

| NO | URAIAN                                                                | RINCIAN VOLUME KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN     | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 1  | 2                                                                     | 3                       | 4                   | 5            | 6      | 7                               |
| A. | STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM                              |                         |                     |              |        |                                 |
| 1. | Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah                           |                         |                     |              |        |                                 |
|    | a. Panwas Kabupaten/Kota                                              |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Ketua                                                                 | org x bln x k/k         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 12 bulan |
|    | Anggota                                                               | org x bln x k/k         | 2 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | b. Panwas Kecamatan                                                   |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Ketua                                                                 | org x bln x kec         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 9 bulan  |
|    | Anggota                                                               | org x bln x kec         | 2 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | c. Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan                      |                         |                     |              |        |                                 |
|    | PPL                                                                   | org x bln x d/k         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 6 bulan  |
|    | d. Pengawas TPS                                                       |                         |                     |              |        |                                 |
|    | PTPS                                                                  | org x bln x tps         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 1 bulan  |
| 2. | Honorarium Kesekretariatan                                            |                         |                     |              |        |                                 |
|    | a. Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota                                  |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Kepala sekretariat                                                    | org x bln x k/k         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 12 bulan |
|    | Bendahara (Bendahara Pengeluaran Pembantu)                            | org x bln x k/k         | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pelaksana teknis                                                      | org x bln x k/k         | paling banyak 6 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Tenaga pendukung (Sopir, Satpam, Pramukbakti)                         | org x bln x k/k         | paling banyak 4 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | b. Sekretariat Panwas Kecamatan                                       |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Kepala Sekretariat                                                    | org x bln x kec         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 9 bulan  |
|    | Bendahara Pembantu/PUMK                                               | org x bln x kec         | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Tenaga Teknis & Pendukung                                             | org x bln x kec         | paling banyak 3 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
| 3. | Kelompok Kerja Pengawasan                                             |                         |                     |              |        |                                 |
|    | a. Pokja Bawaslu Provinsi                                             |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Pokja Sentra Gakkumdu                                                 | org x bln               | paling banyak 10 OB | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 9 bulan  |
|    | Pokja Sengketa Pemilu                                                 | org x bln               | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 3 bulan  |
|    | Pokja Pengawasan DPT                                                  | org x bln               | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Pencalonan                                           | org x bln               | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Kampanye                                             | org x bln               | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Pungut Hitung                                        | org x bln               | paling banyak 13 OB | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil                     | org x bln               | paling banyak 13 OB | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan PHPU                                                 | org x bln               | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | b. Pokja Panwas Kabupaten/Kota                                        |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Pokja Sentra Gakkumdu                                                 | org x bln x k/k         | paling banyak 10 OB | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 9 bulan  |
|    | Pokja Sengketa Pemilu                                                 | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 3 bulan  |
|    | Pokja Pengawasan DPT                                                  | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Pencalonan                                           | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Kampanye                                             | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Pungut Hitung                                        | org x bln x k/k         | paling banyak 13 OB | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil                     | org x bln x k/k         | paling banyak 13 OB | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan PHPU                                                 | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | c. Pokja Panwas Kecamatan                                             |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Pokja Pengawasan DPT dan Kampanye                                     | org x bln x kec         | paling banyak 6 OB  | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 3 bulan  |
|    | Pokja Pengawasan Pungut Hitung                                        | org x bln x kec         | paling banyak 6 OB  | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 1 bulan  |
|    | Pokja Pengawasan Rekapitulasi                                         | org x bln x kec         | paling banyak 6 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
| 4. | Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan di Kabupaten/Kota |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Pejabat Pembuat Komitmen                                              | org x bln               | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 12 bulan |
|    | Staf Pengelola Keuangan                                               | org x bln               | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                                         | org x bln               | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pejabat Penerima Barang/Jasa                                          | org x bln               | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |

| NO | URAIAN                                                                     | RINCIAN VOLUME KEGIATAN |        |           | VOLUME KEGIATAN    | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. | STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA         |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. | <b>Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor</b>                            |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>a. Kabupaten/Kota</b>                                                   |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Sewa gedung/kantor                                                         | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        | Biaya sewa gedung/ meubelair/ peralatan kantor hanya dapat dialokasikan apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah.                                                                       |
|    | Sewa meubelair                                                             | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Sewa peralatan kantor                                                      | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>b. Kecamatan</b>                                                        |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Sewa gedung/kantor                                                         | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Sewa meubelair                                                             | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Sewa peralatan kantor                                                      | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. | <b>Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya</b>               |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>a. Kabupaten/Kota</b>                                                   |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Kendaraan Operasional Roda 4                                               | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Kendaraan Operasional Roda 2                                               | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Kendaraan Lainnya                                                          | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | <b>Pemeliharaan Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor</b>                    |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>a. Kabupaten/Kota</b>                                                   |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Pemeliharaan Gedung                                                        | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        | Biaya pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan kantor hanya dapat dialokasikan apabila mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah dan biaya pemeliharaannya tidak dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. |
|    | Pemeliharaan Meubelair                                                     | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Pemeliharaan Peralatan Kantor                                              | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>b. Kecamatan</b>                                                        |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Pemeliharaan Gedung                                                        | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Pemeliharaan Meubelair                                                     | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Pemeliharaan Peralatan Kantor                                              | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | <b>Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>                            |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>a. Bawaslu Provinsi</b>                                                 |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Roda 4                                                                     | unit x                  | bln    |           | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Roda 2                                                                     | unit x                  | bln    |           | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>b. Panwas Kabupaten/Kota</b>                                            |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Roda 4                                                                     | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Roda 2                                                                     | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>c. Panwas Kecamatan</b>                                                 |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Roda 2                                                                     | unit x                  | bln x  | kec       | paling banyak 4 UB | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | <b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                  |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>a. Bawaslu Provinsi</b>                                                 |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Alat Tulis Kantor (ATK)                                                    | pkt x                   | bln    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Rapat Biasa                                                                | kali x                  | org x  | bln       | OK                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>b. Panwas Kabupaten/Kota</b>                                            |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Alat Tulis Kantor (ATK)                                                    | pkt x                   | bln x  | k/k       | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Langganan Listrik                                                          | bln x                   | k/k    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Langganan Telepon                                                          | bln x                   | k/k    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Langganan Air                                                              | bln x                   | k/k    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Langganan Internet                                                         | bln x                   | k/k    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Rapat Biasa                                                                | kali x                  | org x  | bln x k/k | OK                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Penanda Identitas Panwas untuk Kabupaten, Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS | pkt x                   | org x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>c. Panwas Kecamatan</b>                                                 |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Alat Tulis Kantor (untuk kebutuhan Panwascam, PPL dan Pengawas TPS)        | pkt x                   | bln x  | kec       | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Langganan Listrik                                                          | bln x                   | kec    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Langganan Telepon                                                          | bln x                   | kec    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Langganan Air                                                              | bln x                   | kec    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Langganan Internet                                                         | bln x                   | kec    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Rapat Biasa                                                                | kali x                  | org x  | bln x kec | OK                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>d. PPL</b>                                                              |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Rapat Biasa                                                                | kali x                  | org x  | bln x d/k | OK                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>e. Pengawas TPS</b>                                                     |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Biaya pengganti makan                                                      | org x                   | hari x | tps       | OH                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | <b>Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS</b>                 |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | a. Pembentukan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota)                              | kali x                  | pkt x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif.                                                                                                                                      |
|    | b. Pembentukan PPL (di Kecamatan)                                          | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | b. Pembentukan Pengawas TPS (di Kecamatan)                                 | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | <b>Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu</b>                         |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | a. Bimtek/Pelatihan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)                          | kali x                  | pkt    |           | PAKET              | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif.                                                                                                                                      |
|    | b. Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota)              | kali x                  | pkt x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | c. Pelantikan/Bimtek/Pelatihan PPL (di Kecamatan)                          | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | d. Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas TPS (di Kecamatan)                 | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | <b>Advokasi Hukum</b>                                                      |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|    | a. Advokasi Hukum di Provinsi                                              | kali x                  | pkt    |           | PAKET              | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif.                                                                                                                                      |
|    | b. Advokasi Hukum di Kab/Kota                                              | kali x                  | pkt x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |

| NO  | URAIAN                                                                                                         | RINCIAN VOLUME KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | <b>Sosialisasi Pengawasan Pemilu</b>                                                                           |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Provinsi                                                                   | kali x pkt              | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
|     | b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota                                                                   | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | c. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan                                                                  | kali x pkt x kec        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
| 10. | <b>FGD/Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>                                         |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Provinsi                                                                  | kali x pkt              | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
|     | b. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota                                                                  | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | c. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kecamatan                                                                 | kali x pkt x kec        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
| 11. | <b>Musyawarah Penyelesaian Sengketa</b>                                                                        |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Penyelesaian Sengketa di Provinsi                                                                           | kali x pkt              | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
|     | b. Penyelesaian Sengketa di Kab/Kota                                                                           | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
| 12. | <b>Kegiatan Sentra Gakkumdu</b>                                                                                |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Penanganan Pelanggaran di Provinsi                                                                          | kali x pkt              | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
|     | b. Penanganan Pelanggaran di Kab/Kota                                                                          | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
| 13. | <b>Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan</b>                                              |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Raker/Rakor/Rakemis dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)                                                    | kali x pkt              | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
|     | b. Raker/Rakor/Rakemis dengan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota)                                                   | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | c. Raker/Rakor/Rakemis dengan PPL (di Kecamatan)                                                               | kali x pkt x kec        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | d. Raker/Rakor/Rakemis dengan Pengawas TPS (di Desa/Kel)                                                       | kali x pkt x d/k        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
| 14. | <b>Koordinasi Dengan Stakeholder</b>                                                                           |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Rakor Dengan Stakeholder di Provinsi                                                                        | kali x pkt              | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
|     | b. Rakor Dengan Stakeholder di Kab/Kota                                                                        | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
| 15. | <b>Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Supervisi/ Investigasi/ Panggilan Sidang Kode Etik</b> |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | <b>a. Bawaslu Provinsi</b>                                                                                     |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan/ Panggilan Sidang Bawaslu RI/ DKPP/ MK                                                    | kali x org              | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Kab/Kota                                                                      | kali x org x k/k        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Kecamatan                                                                     | kali x org x kec        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan                                                               | kali x org x d/k        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |
|     | <b>b. Panwas Kabupaten/Kota</b>                                                                                |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan/ Panggilan Sidang Bawaslu RI/ DKPP/ MK                                                    | kali x org x k/k        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan/ Panggilan Sidang ke Bawaslu Provinsi                                                     | kali x org x k/k        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Kecamatan                                                                     | kali x org x kec        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan                                                               | kali x org x d/k        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |
|     | <b>c. Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan</b>                                                                    |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan ke Kab/Kota                                                                               | kali x org x kec        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan                                                               | kali x org x d/k        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |
|     | <b>d. Transport PPL</b>                                                                                        |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan ke Kecamatan                                                                              | kali x org x d/k        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke TPS                                                                           | kali x org x tps        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |

Lampiran III

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017

| NO | URAIAN                                                                | RINCIAN VOLUME KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN     | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 1  | 2                                                                     | 3                       | 4                   | 5            | 6      | 7                               |
| A. | STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM                              |                         |                     |              |        |                                 |
| 1. | Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah                           |                         |                     |              |        |                                 |
|    | a. Panwas Kabupaten/Kota                                              |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Ketua                                                                 | org x bln x k/k         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 12 bulan |
|    | Anggota                                                               | org x bln x k/k         | 2 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | b. Panwas Kecamatan                                                   |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Ketua                                                                 | org x bln x kec         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 9 bulan  |
|    | Anggota                                                               | org x bln x kec         | 2 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | c. Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan                      |                         |                     |              |        |                                 |
|    | PPL                                                                   | org x bln x d/k         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 6 bulan  |
|    | d. Pengawas TPS                                                       |                         |                     |              |        |                                 |
|    | PTPS                                                                  | org x bln x tps         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 1 bulan  |
| 2. | Honorarium Kesekretariatan                                            |                         |                     |              |        |                                 |
|    | a. Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota                                  |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Kepala sekretariat                                                    | org x bln x k/k         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 12 bulan |
|    | Bendahara (Bendahara Pengeluaran Pembantu)                            | org x bln x k/k         | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pelaksana teknis                                                      | org x bln x k/k         | paling banyak 6 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Tenaga pendukung (Sopir, Salpam, Pramukbakti)                         | org x bln x k/k         | paling banyak 4 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | b. Sekretariat Panwas Kecamatan                                       |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Kepala Sekretariat                                                    | org x bln x kec         | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 9 bulan  |
|    | Bendahara Pembantu/PUMK                                               | org x bln x kec         | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Tenaga Teknis & Pendukung                                             | org x bln x kec         | paling banyak 3 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
| 3. | Kelompok Kerja Pengawasan                                             |                         |                     |              |        |                                 |
|    | a. Pokja Panwas Kabupaten/Kota                                        |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Pokja Sentra Gakkumdu                                                 | org x bln x k/k         | paling banyak 10 OB | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 9 bulan  |
|    | Pokja Sengketa Pemilu                                                 | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 3 bulan  |
|    | Pokja Pengawasan DPT                                                  | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Pencalonan                                           | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Kampanye                                             | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Pungut Hitung                                        | org x bln x k/k         | paling banyak 13 OB | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil                     | org x bln x k/k         | paling banyak 13 OB | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pokja Pengawasan PHPU                                                 | org x bln x k/k         | paling banyak 8 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | b. Pokja Panwas Kecamatan                                             |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Pokja Pengawasan DPT dan Kampanye                                     | org x bln x kec         | paling banyak 6 OB  | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 3 bulan  |
|    | Pokja Pengawasan Pungut Hitung                                        | org x bln x kec         | paling banyak 6 OB  | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 1 bulan  |
|    | Pokja Pengawasan Rekapitulasi                                         | org x bln x kec         | paling banyak 6 OB  | Rp. ....     |        | sda                             |
| 4. | Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan di Kabupaten/Kota |                         |                     |              |        |                                 |
|    | Pejabat Pembuat Komitmen                                              | org x bln               | 1 OB                | Rp. ....     |        | masa kerja paling lama 12 bulan |
|    | Staf Pengelola Keuangan                                               | org x bln               | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                                         | org x bln               | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |
|    | Pejabat Penerima Barang/Jasa                                          | org x bln               | 1 OB                | Rp. ....     |        | sda                             |

| NO  | URAIAN                                                                     | RINCIAN VOLUME KEGIATAN |        |           | VOLUME KEGIATAN    | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.  | STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA         |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.  | Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor                                   |                         |        |           |                    |              |        | Biaya sewa gedung/ meubelair/ peralatan kantor hanya dapat dialokasikan apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah.                                                                       |
|     | a. Kabupaten/Kota                                                          |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Sewa gedung/kantor                                                         | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Sewa meubelair                                                             | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Sewa peralatan kantor                                                      | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Kecamatan                                                               |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Sewa gedung/kantor                                                         | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Sewa meubelair                                                             | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Sewa peralatan kantor                                                      | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya                      |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | a. Kabupaten/Kota                                                          |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Kendaraan Operasional Roda 4                                               | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Kendaraan Operasional Roda 2                                               | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Kendaraan Lainnya                                                          | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | Pemeliharaan Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor                           |                         |        |           |                    |              |        | Biaya pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan kantor hanya dapat dialokasikan apabila mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah dan biaya pemeliharaannya tidak dialokasikan oleh Pemerintah Daerah. |
|     | a. Kabupaten/Kota                                                          |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Pemeliharaan Gedung                                                        | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Pemeliharaan Meubelair                                                     | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Pemeliharaan Peralatan Kantor                                              | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Kecamatan                                                               |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Pemeliharaan Gedung                                                        | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Pemeliharaan Meubelair                                                     | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Pemeliharaan Peralatan Kantor                                              | unit x                  | bln x  | kec       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.  | Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Roda 4 dan 2                                   |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | a. Panwas Kabupaten/Kota                                                   |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Roda 4                                                                     | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Roda 2                                                                     | unit x                  | bln x  | k/k       | UB                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Panwas Kecamatan                                                        |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Roda 2                                                                     | unit x                  | bln x  | kec       | paling banyak 4 UB | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                         |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | a. Panwas Kabupaten/Kota                                                   |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Alat Tulis Kantor (ATK)                                                    | pkt x                   | bln x  | k/k       | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Langganan Listrik                                                          | bln x                   | k/k    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Langganan Telepon                                                          | bln x                   | k/k    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Langganan Air                                                              | bln x                   | k/k    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Langganan Internet                                                         | bln x                   | k/k    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Rapat Biasa                                                                | kali x                  | org x  | bln x k/k | OK                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Penanda Identitas Panwas untuk Kabupaten, Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS | pkt x                   | org x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Panwas Kecamatan                                                        |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Alat Tulis Kantor (untuk kebutuhan Panwascam, PPL dan Pengawas TPS)        | pkt x                   | bln x  | kec       | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Langganan Listrik                                                          | bln x                   | kec    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Langganan Telepon                                                          | bln x                   | kec    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Langganan Air                                                              | bln x                   | kec    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Langganan Internet                                                         | bln x                   | kec    |           | BULAN              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Rapat Biasa                                                                | kali x                  | org x  | bln x kec | OK                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | c. PPL                                                                     |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Rapat Biasa                                                                | kali x                  | org x  | bln x d/k | OK                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | d. Pengawas TPS                                                            |                         |        |           |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Biaya pengganti makan                                                      | org x                   | hari x | tps       | OH                 | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS                        |                         |        |           |                    |              |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif.                                                                                                                                      |
|     | a. Pembentukan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota)                              | kali x                  | pkt x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Pembentukan PPL (di Kecamatan)                                          | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Pembentukan Pengawas TPS (di Kecamatan)                                 | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu                                |                         |        |           |                    |              |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif.                                                                                                                                      |
|     | a. Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota)              | kali x                  | pkt x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Pelantikan/Bimtek/Pelatihan PPL (di Kecamatan)                          | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | c. Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas TPS (di Kecamatan)                 | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Advokasi Hukum                                                             |                         |        |           |                    |              |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif.                                                                                                                                      |
|     | a. Advokasi Hukum di Kab/Kota                                              | kali x                  | pkt x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.  | Sosialisasi Pengawasan Pemilu                                              |                         |        |           |                    |              |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif.                                                                                                                                      |
|     | a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota                               | kali x                  | pkt x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan                              | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. | FGD/Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif            |                         |        |           |                    |              |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif.                                                                                                                                      |
|     | a. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota                              | kali x                  | pkt x  | k/k       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |
|     | b. Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kecamatan                             | kali x                  | pkt x  | kec       | PAKET              | Rp. ....     |        |                                                                                                                                                                                                                        |

| NO  | URAIAN                                                                                                         | RINCIAN VOLUME KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | <b>Musyawarah Penyelesaian Sengketa</b>                                                                        |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Penyelesaian Sengketa di Kab/Kota                                                                           | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
| 12. | <b>Kegiatan Sentra Gakkumdu</b>                                                                                |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Penanganan Pelanggaran di Kab/Kota                                                                          | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
| 13. | <b>Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan</b>                                              |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Raker/Rakor/Rakernis dengan Panwas Kecamatan (di Kab/Kota)                                                  | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
|     | b. Raker/Rakor/Rakernis dengan PPL (di Kecamatan)                                                              | kali x pkt x kec        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | c. Raker/Rakor/Rakernis dengan Pengawas TPS (di Desa/Kel)                                                      | kali x pkt x d/k        | PAKET           | Rp. ....     |        |                                                                                   |
| 14. | <b>Koordinasi Dengan Stakeholder</b>                                                                           |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | a. Rakor Dengan Stakeholder di Kab/Kota                                                                        | kali x pkt x k/k        | PAKET           | Rp. ....     |        | Detil belanja disesuaikan dengan kebutuhan secara efisien, ekonomis, dan efektif. |
| 15. | <b>Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Supervisi/ Investigasi/ Panggilan Sidang Kode Etik</b> |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | <b>a. Panwas Kabupaten/Kota</b>                                                                                |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan/ Panggilan Sidang Bawaslu RI/ DKPP/ MK                                                    | kali x org x k/k        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan/ Panggilan Sidang ke Bawaslu Provinsi                                                     | kali x org x k/k        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Kecamatan                                                                     | kali x org x kec        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan                                                               | kali x org x d/k        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |
|     | <b>b. Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan</b>                                                                    |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan ke Kab/Kota                                                                               | kali x org x kec        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke Desa/ Kelurahan                                                               | kali x org x d/k        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |
|     | <b>c. Transport PPL</b>                                                                                        |                         |                 |              |        |                                                                                   |
|     | Konsultasi/ Undangan ke Kecamatan                                                                              | kali x org x d/k        | OK              | Rp. ....     |        |                                                                                   |
|     | Supervisi/ Investigasi/ Monev ke TPS                                                                           | kali x org x tps        | OK              | Rp. ....     |        | Selektif.                                                                         |